

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat dinantikan demi kesempurnaan tesis ini.

Surabaya, September 2015

Siti Khoirotul Ula

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Kerangka Teoritik	12
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Metode Penelitian	17

I.	Sistematika Penelitian	20
BAB II : KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DAN TEORI MASLAHAH		
A.	Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan	23
1.	Tindakan Pemerintah	23
2.	Kewenangan Pemerintah	27
3.	Perizinan.....	34
B.	Pengusahaan Pertambangan Dalam Islam	41
1.	Landasan Pengusahaan Pertambangan dalam Islam	41
2.	Teori Maslahah.....	45
a.	Pengertian Maslahah.....	45
b.	Kedudukan Maslahah dalam Hukum Islam.....	48
c.	Sejarah dan Perkembangan Teori Maslahah.....	54
d.	Penerapan Teori Maslahah dalam Hukum Positif.....	60
BAB III : KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA		62
A.	Sejarah Perizinan Usaha Pertambangan di Indonesia.....	54
1.	Sejarah Perizinan Usaha Pertambangan Sebelum Era Reformasi...54	
2.	Perizinan Usaha Pertambangan Setelah Era Reformasi Sebelum Berlakunya Undang-Undang No.4 Tahun 2009	74
B.	Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	76
BAB IV : KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG		

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH ‘AMMAH.....	95
A. Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.....	95
1. Tindakan Pemerintah.....	95
2. Sumber Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan...101	101
3. Bentuk Perizinan Usaha Pertambangan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.....103	103
B. Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Maslahah ‘Ammah.....107	107
1. Nilai-nilai kemaslahatan dalam pokok pikiran Undang-Undang Minerba107	107
2. Pemeliharaan Lingkungan Menurut Hukum Islam dalam Pengusahaan Pertambangan.....111	111
3. Kemaslahatan dalam kewenangan perizinan usaha pertambangan bagi Pemerintah.....113	113
4. Kemaslahatan dalam kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan bagi Masyarakat.....116	116
BAB V : PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran-saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN